BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Dalam perjalanan sejarahnya, angkutan kereta api di tanah air membuktikan peranannya yang berarti pada sektor perhubungan disamping menunjang pertumbuhan ekonomi terutama disektor pertanian, perkebunan dan pertambangan.

Perkeretaapian di Indonesia mulai berperan sejak tanggal 17 Juni 1984, pada waktu itu Gubernur Jenderal Belanda Mr. L.A Baron Sloet Van De beele meresmikan lintasan kereta api Kemijen-Tanggung sepanjang 26 KM.Empat tahun kemudian lintas ini dioperasikan oleh **NISM** (Nederland Indishe Spoorwegh Maatchapy), sebuah perusahaan kereta api swasta milik pemerintah Hindia Belanda. Motivasi pendirian perusahaan ini oleh kolonial Belanda adalah sebagai sarana logistik untuk kepentingan strategis peperangan dan untuk menunjang kebutuhan ekonomi kolonial Belanda. Kehadiran kereta api dalam lintas ini mengundang beberapa perusahaan kereta api lainnya untuk membuka jaringan jalan kereta api, sehingga terdapat kurang lebih 12 buah perusahaan kereta api milik swasta dan satu buah perusahaan kereta api milik pemerintah. Sampai akhir Perang Dunia II di Indonesia telah terdapat kurang lebih 6.458 jaringan jalan kereta api, dan pada tahun 1895 jaringan jalan kereta api telah tersebar di Jawa, Madura, Sumatera dan Sulawesi.

Pada masa pendudukan Jepang, seluruh jaringan kereta api milik Belanda (pemerintah swasta) dikuasai oleh Jepang dengan nama “Ryuku Kyoko” dan berubah menjadi “Tetsudo Kyoko” yang berkantor pusat di Bandung, sedangkan di Sumatera disebut “Tetsudo Tai” yang berkantor di Bukit Tinggi.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya tanggal 28 September 1945 di Balai Besar Bandung para pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api **(AMKA),** melakukan aksi pengambilalihan kekuasaan dari tangan sekutu, sehingga tanggal tersebut dijadikan hari jadi kereta api.

Pada tanggal 27 September 1949 pemerinta Republik Indonesia mengeluarkan Pengumuman Pemerintah No. 2 yang isinya menyatakan bahwa DKA RI dan SS/VS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api **(DKA).** Dengan diundangkannya UU No. 19 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha milik Negara yang mengatur landasan hukum pendiriannya keudian dengan PP No. 22 tahun 1963, DKA berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api **(PNKA).**

Selanjutnya dengan PP No. 1 tahun 1971, maka bentuk usahanya dialihkan dari PNKA menjadi Perusahaan Jawatan **(PERJAN)** yaitu Perusahaan Jawatan Kereta Api **(PJKA).** Setelah berubah dari PNKA menjadi PJKA maka kurang dari 20 tahun kemudian yaitu pada tanggal 31 Oktober 1990 dengan PP No. 57 tahun 1990, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api **(PERUMKA)** yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto tanggal 30 Oktober 1990 maka status Perusahaan Jawatan diganti menjadi Perum.

Setelah melayani masyarakat umum dengan berbagai jenis pelayanan yang dilakukan maka 9 tahun kemudian Perusahaan Umum Kereta Api **(PERUMKA)** mengganti namanya PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Status baru tersebut merupakan peluang untuk meningkatkan kondisi perusahaan dengan peningkatan pelayanan yang akan lebih baik lagi dari segi pelayanan teknis maupun operasional.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi tingakat pusat yang merupakan struktur organisasi garis dan staf berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Darat No. 8 tahun 1991 SK Direksi PERUMKA No. KA/DT/30000/SK 1991 terdiri atas :

a) Direksi yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama
b) Direktorat-direktorat yang terdiri dari :
    - Direktorat Keuangan
    - Direktorat Teknik
    - Direktorat Operasi
    - Direktorat Personalia dan Umum
    - Direktorat Pengembangan Usaha

c) Pusat-pusat yang terdri dari :
    - Pusat Perencanaan dan Pengembangan
    - Pusat Pendidikan dan Pelatihan
    - Pusat Logistik

d) Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Berdasarkan SK Direksi Nomor : II/DT.003/1/4/KA.2001 tanggal 2 Januari 2001 susunan organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung adlah sebagai berikut :

a. Seksi keuangan, yang terdiri atas :

- Sub seksi Keuangan
- Sub seksi Anggaran dan Akuntansi

b. Seksi SDM dan Umum

- Sub seksi SDM
- Sub seksi KRT dan Umum
- Sub seksi Hukum
- Sub seksi Hiperkes dan Keselamatan Kerja

c. Seksi Operasi dan Pemasaran , yang terdiri dari :

- Sub seksi Operasi Teknis (OPNIS)
- Sub seksi Perjalanan Kereta Api (OPKA)
- Sub seksi Pemasaran Angkutan Penumpang
- Sub seksi Pemasaran Angkuan Barang
- Sub seksi Keamanan dan Ketertiban (KamTib)

d. Seksi Jalan Rel dan Jembatan, yang terdiri dari :

- Sub seksi Program
- Sub seksi Jalan Rel
- Sub seksi Jembatan

e. Seksi Traksi

- Sub seksi Lockomotif
- Sub seksi Kereta/Gerbong
- Sub seksi Program

f. Seksi Sinyal Telkom dan Listrik, yang terdiri dari :

- Sub seksi Program
- Sub seksi Sinyal
- Sub seksi Telkom

g. Seksi Properti

- Sub seksi Program
- Sub seksi Tanah
- Sub seksi Bangunan

h. Pemeriksaan Kas Daerah

- Sub seksi Tata Usaha
- Sub seksi Pemeriksaan Stasiun (PMBS)

2.3 Deskripsi Jabatan

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 bandung mempunyai deskripsi jabatan lini dan staf dimana terdpat hubungan wewenang dan garis antara atasan dan bawahan. Atasan dapat memberi perintah kepada bawahan dan dapat mengambil keputusan, begitu juga lini bawahannya dapat memberi perintah kepada bawahannya dan seterusnya.

Sedangkan staf disini berfungsi memberi saran, nasehat, atau anjuran baik secara lisan maupun tulisan dalam rangka pengembangan perusahaan. Staf tidak mempunyai wewenang untuk memberikan perintah.

Deskripsi Jabatan dan tata kerja PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. KM 8 tahun 1991 tanggal 19 Februari 1991, berdasarkan keputusan tersebut susunan organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung dibagi kedalam empat tingkat yang terdiri dari :

- Tingkat Pusat

  Tingkat pusat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis yang berkaitan denagn tugas pokok dan pembinaan manajerial.

- Tingkat Daerah Operasi/Divisi/Divisi Regional

  Tingkat ini bertugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis operasional.

- Tingkat Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

  UPT mempunyai tugas melaksanakan langsung kegiatan operasional dan pelayanan jasa angkutan kereta api, maupun kegiatan lainnya yang menunjang operasi.

Direksi

1) Tugas Pokok dan Fungsi Direksi :

   - Memimpin, mengurus dan mengolah PT. Kereta Api (Persero) sesuai dengan tujuan dan tugas pokok perusahaan.

- Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan PT. Kereta Api (Persero).
- Mewakili PT. Kereta Api (Persero) di dalam dan di luar negeri.
- Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Menteri.

2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut direksi mempunyai fungsi :
    - Perencanaan dan pengelolaan kegiatan-kegiatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) secara terpadu.
    - Pegusahaan, pengembangan prasarana dan sarana angkutan Kereta Api
    - Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia.
3) Direktur mempunyai Tugas :
    - Memberikan bahan masukan, pertimbangan dan saran-saran untuk menetapkan kebijaksanaan Menteri dan keputusan Direksi.
    - Bertindak atas nama Direksi untuk bidangnya masing-masing.

Tugas dan Fungsi Direktorat Keuangan

1) Tugas Direktorat Keuangan :

   Melaksanakan perumusan kebijaksanaan serta pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan, perencanaan anggaran, dan pengendalian

pelaksanaan administrasi keuangan. Pelaksanaan akuntansi umum maupun akuntansi biaya serta pelaksanaan analisis dan pengendalian perhitungan biaya dan kelayakan investasi.

2) Fungsi Direktorat Keuangan :

- Melaksanakan penyusunan otorisasi dan melaksakan pengendalian rencana kerja dan anggaran perusahaan serta sumber-sumber dana maupun penggunaan dana.
- Melaksanakan penyusunan dan pengendalian-pengendalian peraturan keuangan perusahaan, melaksanakan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta melaksanakan pengesahan pembayaran bank internal maupun eksternal.
- Melaksanakan penyusunan dan pengendalian akuntansi umum, akuntansi biaya, dan penyusunan perbendaharaan kas ke kantor pusat.
- Melaksanakan penyusunan dan pengendalian analisis dan perhitungan biaya serta kelayakan investasi.

Job description pada Seksi Keuangan, Subseksi Anggaran dan Akuntansi adalah sebagai berikut :

- Kepala Kelompok I (KAPOK I)

  Kelompok penyelenggaraan anggaran mempunyai tugas pokok :

  – Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

  – Pengendalian perencanaan pelaksanaan anggaran

– Menerbitkan Surat Otorisasi NPD (Nota Permohonan Data)

– Menyusun laporan Realisasi Anggaran (RKA)

- Kepala Kelompok II (KAPOK II)

  Kelompok penyelenggara verifikasi serta akuntansi pendapatan dan pengeluaran mempunyai tugas :

  – Verifikasi, meneliti kelengkapan, kebenaran serta keabsahan yang berkenaan dengan pengeluaran dan pendapatan Daerah Operasi 2 Bandung.

  – Akuntansi pendapatan, penerimaan dan pengeluaran kas, meneliti kelengkapan analisa dokumen lainnya yang diterima dari unit-unit pelaksana, mengikhtisarkan analisa stasiun, membuat bukti jurnal dan menyelenggarakan buku pembantu yang bersangkutan dengan pengeluaran dan pendapatan Daerah Operasi 2 Bandung

- Kepala Kelompok III (KAPOK III)

  Kelompok penyelenggara akuntansi biaya, persediaan dan aktiva tetap mempunyai tugas pokok :

  – Pembiayaan dan dokumentasi lainnya yang diterima dari unit-u nit pelaksana menyangkut akuntansi biaya.

  – menyusun buku pembantu yang berkenaan dengan akuntansi biaya, persediaan dan aktiva tetap.

  – Melakukan pemantauan atas mutasi-mutasi terhadap aktiva tetap.

- Kepala Kelompok IV (KAPOK IV)

  - Proses Komputerisasi akuntansi.
  - Penyelenggaraan buku besar.
  - Pembuatan daftar sisa.
  - Penyusunan daftar sisa.
  - Penyusunan neraca lajur.
  - Pembuatan jurnal khusus.
  - Pelaksanaan rekonsiliasi hubungan pembukuan.
  - Penyelidikan terhadap angka tahun yang tidak wajar pda neraca lajur yang akan dituangkan dalam ikhtisar dukunagn laporan keuangan wilayah usaha kereta api Jawa
  - Pembuatan laporan berkala ikhtisar dukungan laporan keuangan.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang aktivitas PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yaitu mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai berikut :

1. Kedudukan

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah BUMN lingkungan Departemen Perhubungan yang dipimpin oleh Direksi yang bertanggungjawab pada Menteri Perhubungan.

Menteri Perhubungan untuk selanjutnya melakukan pembinaan terhadap PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dibantu oleh Direktorat Jendral Perhubungan

Darat sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Menteri Perhubungan. Dewan pengawas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggungjawab kepada menteri Perhubungan dan melakukan pengawasan rencana kerja dan anggaran PT. Kereta Api Indonesi (Persero) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tugas

Sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan No. 8 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Tingkat Pusat Bab 1Pasal 2, PT. Kereta Api Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengusahaan pelayanan jasa kereta api dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang secara massal guna menunjang pembangunan nasional.

3. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mempunyai fumgsi sebagai berikut :

- Penyediaan, pengoperasian, pendayagunaan, pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana angkutan bukan diatas jalan yang merupakan kelanjutan dari kereta api.
- Pemeliharaan, perbaikan, dan pendayagunaan prasarana jalan, rel, jembatan, terowongan, instalasi sinyal aliran, serta menyediakan dan pendayagunaan stasiun, bangunan stastiun, bangunan depu, serta bangunan gedung lainnya

- Pengoperasian, pendayagunaan, pengendalian pengusahaan stasiun pemberangkatan, penurunan dan atau angkutan penumpang maupun barang serta jasa lainnya yang terkait.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan Departemen Perhubungan yang dalam kegiatan usahanya mempunyai sifat menyediakan pelayanan bagi kepentingan umum disamping untuk mendapatkan keuntungan yang berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Maksud dan Tujuan perusahaan adalah mengusahakan pelayanan jasa angkutan kereta api dalam rangka memperlancar penumpang dan arus barang secara massal untuk menunjang pembangunan nasional.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung bergerak dibidang usaha transportasi perkeretaapian, adapun bidang usaha perusahaan adalah penjualan atau pemasaran angkutan berupa :

a) Angkutan penumpang

   Jenis angkutan penumpang :

   - KA Lokal.
   - KA Penumpang Ekonomi.
   - KA Penumpang Bisnis.
   - KA Penumpang eksekutif.

b) Angkutan Barang

   Angkutan Baranmg terdiri dari :

   - Angkutan Negosiasi yang terdiri dari :

Angkutan baja dari Cilegon ke Waru, angkutan BBM dari Rewulu ke Madiun, angkutan perkebunan di ESU, angkutan batubara di ESB dan Surabaya.

- Angkutan non negosiasi

  Angkutan peti kemas dan KA Barang Cepat.

Lapangan usaha PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung berdasarkan PP No. 57 tahun 1990 pasal 7 adalah :

a. Penjualan atau pemasran jasa angkutan penumpang, barang pendukung angkutan dan usaha lain.
b. Produksi pengoperasian kereta api.
c. Perawatan, pembangunan, dan pendayagunaan prasarana, yang meliputi lokomotif dan gerbong.
d. Perawatan, pembangunan dan penadyangunaan prasarana, yang meliputi rel kereta api.
e. Pendayagunaan personil.
f. Pengelolaan dan pendayagunaan keuangan.
g. Secara terus-menerus melakukan perbaikan dan penyesuaian sistem dan metode pengelolaan perusahaan.